

**Analisis Efisiensi Kinerja Antara Bank BUMN dan Bank Umum
Swasta Nasional di Indonesia**

SKRIPSI



Oleh :

Nama : Adi Yusri

No. Mahasiswa : 03313020

Program Studi : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

YOGYAKARTA

2007

Analisis Efisiensi Kinerja Antara Bank BUMN Dan Bank Umum Swasta Nasional Di
Indonesia

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir
guna memperoleh gelar Sarjana jenjang strata 1

Jurusan Ilmu Ekonomi,
Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama : Adi Yusri
Nomor Mahasiswa : 03313020
Jurusan : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
YOGYAKARTA
2007**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

” Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain seperti dimaksud dalam buku pedoman penyusunan skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi FE UII. Apabiladi kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”



Yogyakarta, November 2007

Penulis,

Adi Yusri

PENGESAHAN

Analisis Efisiensi Kinerja Antara Bank BUMN Dan Bank Umum Swasta Nasional Di
Indonesia

Nama : Adi Yusri
Nomor Mahasiswa : 03313020
Jurusan : Ilmu Ekonomi



Yogyakarta, November 2007

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,

Dr. Jaka Sriyana, SE., M.Si

PENGESAHAN UJIAN

Telah dipertahankan/diuji dan disahkan
untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Sarjana jenjang Strata 1 pada Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Nama : Adi Yusri
Nomor Mahasiswa : 03 313 020
Jurusan : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, Desember 2007

Disahkan oleh,

Pembimbing Skripsi : Drs. Jaka Sriyana, M.Si., Ph.D
Penguji I : Drs. Suharto, M.Si.
Penguji II : Drs. Sarastri Mumpuni R, M.Si.

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Drs. Asmai Ishak, M.Bus., Ph.D

ABSTRACT

Analisis Efisiensi Antara Bank BUMN & Bank Umum Swasta Nasional Di Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis efisiensi antara bank BUMN dan bank Swasta Nasional di Indonesia. Hipotesis yang diajukan yaitu ada perbedaan efisiensi antara bank BUMN dan bank Swasta Nasional di Indonesia

Subyek Penelitian ini dibatasi pada analisis kinerja Bank BUMN yang terdiri dari Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Ekspor Indonesia dan Bank Swasta Nasional yang menjadi 5 besar di Indonesia yang terdiri dari Bank Central Asia (BCA), Bank Danamon Indonesia, Bank Internasional Indonesia, Bank Niaga, Bank Panin (Infobank, 2006) yang berdasarkan pada laporan keuangan yang telah dipublikasikan periode 2006. Sumber data yang digunakan diperoleh dari laporan keuangan yang dipublikasikan di Direktori Perbankan Indonesian. Metode analisis data dilakukan dengan pengujian melalui prosedur sebagai berikut: (1) menentukan rasio keuangan CAMEL dari setiap kelompok pada Bank BUMN dan Bank Swasta Nasional; (2) menentukan tingkat rata-rata (*mean*) efisiensi kinerja dari setiap kelompok pada Bank BUMN dan Bank Swasta Nasional; (3) menentukan perbedaan rata-rata efisiensi kinerja antara Bank BUMN dan Bank Swasta Nasional. Metode statistik yang digunakan adalah alat analisis uji beda t-test. Apabila hasil nilai signifikansi t lebih besar dari 0,05 berarti menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata efisiensi kinerja bank BUMN dan bank swasta nasional. Sebaliknya apabila hasil nilai signifikansi t lebih kecil dari 0,05 berarti menunjukkan ada perbedaan yang signifikan antara yang signifikan antara rata-rata efisiensi kinerja bank BUMN dan Bank Swasta Nasional.

Hasil penelitian menunjukkan pada bila dilihat dari rasio CAMEL yang meliputi CAR, BDR, NPM, ROA, dan LDR memperlihatkan hasil tidak adanya perbedaan efisiensi antara bank pemerintah (BUMN) dengan bank swasta nasional. Dengan demikian hipotesis yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara efisiensi bank BUMN dan bank swasta nasional di Indonesia serta efisiensi pada bank pemerintah (BUMN) lebih baik bila dibandingkan dengan efisiensi pada bank swasta nasional secara statistik tidak dapat dibuktikan atau hipotesis tersebut ditolak.

Kata-kata kunci : *Bank BUMN, Bank Swasta Nasional, Rasio CAMEL, Uji Beda t-Test*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN	iv
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN DAFTAR ISI	viii
HALAMAN DAFTAR TABEL	xi
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiii
HALAMAN ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN UMUM SUBYEK PENELITIAN.....	10
2.1. Perkembangan Lembaga Keuangan Bank.....	10
2.2. Kinerja Lembaga Keuangan Bank	12
2.3. Bank.....	15
BAB III KAJIAN PUSTAKA.....	18
3.1. Kinerja Lembaga Keuangan.....	18
3.2. Analisis Rasio Keuangan.....	20
3.3. Bank BUMN dan Bank Swasta Nasional Di Indonesia	21

BAB IV	LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS	24
	4.1. Lembaga Keuangan.....	24
	4.2. Klasifikasi Lembaga Keuangan	25
	4.3. Lembaga Keuangan Bank	28
	4.4. Evaluasi Kinerja Bank Umum	31
	4.5. CAMEL.....	34
	4.6. Hipotesis.....	37
BAB V	METODE PENELITIAN	40
	5.1 Obyek Penelitian	40
	5.2. Jenis Data	40
	5.3. Sumber Data.....	40
	5.4. Model Penelitian	41
	5.5. Definisi Operasional.....	41
	5.6. Metode Analisis Data.....	42
BAB VI	ANALISIS HASIL PENELITIAN.....	45
	6.1. Analisis Data.....	45
	6.1.1 Uji Beda t_Test CAR.....	45
	6.1.2 Uji Beda t_Test BDR	48
	6.1.3 Uji Beda t_Test NPM.....	50
	6.1.4 Uji Beda t_Test ROA.....	53
	6.1.5 Uji Beda t_Test LDR	56
	6.2. Analisis Pembahasan.....	58
BAB VII	KESIMPULAN dan IMPLIKASI	
	7.1. Kesimpulan.....	60
	7.2. Implikasi	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1	Peringkat Empat Besar bank Umum Di Indonesia Berdasarkan Nilai Aktiva	6
Tabel 1.2	Peringkat Empat Besar bank Umum Di Indonesia Berdasarkan Nilai Kredit.....	6
Tabel 2.1	Perekembangan Jumlah Bank dan Kantor Bank	11
Tabel 2.2	Perekembangan Bank Berdasarkan Wilayah.....	11
Tabel 2.3	Perekembangan Kinerja Perbankan.....	12
Tabel 2.4	Perekembangan Kinerja Bank Umum Di Indonesia	15
Tabel 4.1	Klasifikasi Perbankan Di Indonesia	29
Tabel 6.1	Hasil Analisis Uji Beda t-Test CAR.....	45
Tabel 6.2	Hasil Uji Beda t-Test CAR.....	47
Tabel 6.3	Hasil Analisis Uji Beda t-Test BDR.....	48
Tabel 6.4	Hasil Uji Beda t-Test BDR.....	50
Tabel 6.5	Hasil Analisis Uji Beda t-Test NPM	50
Tabel 6.6	Hasil Uji Beda t-Test NPM	52
Tabel 6.7	Hasil Analisis Uji Beda t-Test ROA	53
Tabel 6.8	Hasil Uji Beda t-Test ROA	55
Tabel 6.9	Hasil Analisis Uji Beda t-Test LDR.....	56
Tabel 6.10	Hasil Uji Beda t-Test LDR.....	57
Tabel 6.11	Hasil Perhitungan CAMEL Dengan Uji Beda t-Test	59

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 Klasifikasi Lembaga Keuangan Di Indonesia.....	26
Gambar 5.1 Efisiensi Kinerja Bank	41



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data CAMEL Direktori Perbankan Indonesia

Lampiran 2-1 Uji Beda t-Test *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Lampiran 2-2 Uji Beda t-Test *Bad Debt Ratio* (BDR)

Lampiran 2-3 Uji Beda t-Test *Net Profit Margin* (NPM)

Lampiran 2-4 Uji Beda t-Test *Return on Assets* (ROA)

Lampiran 2-5 Uji Beda t-Test *Loan to Deposit Ratio* (LDR)



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS BELANJA KE DALAM BELANJA APARATUR DAERAH DAN BELANJA PELAYANAN PUBLIK PADA REALISASI APBD TAHUN ANGGARAN 2004 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”**

Penulisan tesis ini disusun sebagai salah satu syarat dalam mencapai jenjang S-2 bidang akuntansi konsentrasi sektor publik di Universitas Gadjah Mada.

Dalam menyusun tesis ini penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangannya, hal ini dikarenakan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki sangat terbatas.

Penulis dengan sepenuhnya menyadari bahwa tesis ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa adanya bimbingan, dorongan, nasehat, dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengungkapkan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya dan sedalam-dalamnya kepada :

✚ Bp. Prof. Dr. Abdul Halim, MBA., Ak. selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk berdiskusi dan berbagi ilmu.

- ✚ Bp. Prof. Dr. Slamet Sugiri, MBA., Ak. Dan Irwan Ritonga, SE., M.Bus. selaku dosen penguji tesis.
- ✚ Bp Dr. Drs. Hardo Basuki, M.Soc.Sc., Ak., Dr. Indra Bastian, MBA., Ak., Drs. Rusdi Akbar, M.Sc, Ak. yang telah berbagi pengetahuan di bidang Akuntansi Sektor Publik.
- ✚ Dosen-dosen pengajar di program M.Si Ilmu Akuntansi UGM atas ilmu yang diberikan.
- ✚ Keluarga besar Politeknik Muhammadiyah Yogyakarta, atas semangat, perhatian, berbagi pengalaman yang diberikan kepada saya dalam menempuh studi lanjut.
- ✚ Keluarga besar STIE Pelita Nusantara Semarang, atas segala dukungan dan semangat yang diberikan kepada saya untuk menempuh studi lanjut.

Semoga dengan segala bimbingannya dan dorongan yang diberikan kepada penulis mendapat balasan dan kebaikan dari Allah SWT.

Akhir kata, tiada gading yang tak retak, penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca untuk mencapai keperluan di masa mendatang, atas isi dan redaksi dari tesis ini dan berharap semoga tulisan sederhana ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembaca dan semua pihak yang memerlukannya.

Yogyakarta, Desember 2007

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan yang berkembang di Indonesia dituntut untuk memiliki kinerja yang baik. Salah satu cara mengukur kinerja perbankan adalah efisiensi yang dapat dilihat dari penggunaan input dan output yang digunakan untuk operasional bank. Salah satu penyebab inefisiensi antara lain diakibatkan oleh alokasi input yang kurang sempurna pada kegiatan operasionalisasi perbankan. Semakin efisien suatu bank maka kinerjanya semakin baik. Secara umum kondisi perbankan di Indonesia belum semuanya efisien. Indikasi ini terlihat antara lain dari tingkat suku bunga kredit (*prime rate*) di Indonesia sebesar 18,5% pada tahun 1995, 16,7% pada tahun 1996 dan melonjak 39% pada tahun, 1999. Angka ini relatif tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan ASEAN, misalnya di Malaysia sebesar 7,3% pada tahun 1995, 9% pada tahun 1996, 8,03% pada tahun 1999, di Singapura sebesar 6% pada tahun 1995 dan 1996 dan 5 % pada tahun 1999 (Sakhowi 2002).

Secara umum kondisi perbankan di Indonesia didominasi atas kepemilikan pemerintah, kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan yang menyangkut upaya peningkatan efisiensi di sektor keuangan melalui penggalakan persaingan antar bank. Pada tahun 1988 pemerintah mengeluarkan diregulasi berupa Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 (PAKTO'88) yang berisi antara lain berupa: (1) diberikannya

kemudahan-kemudahan bagi bank dalam mendirikan bank swasta baru, pembukaan kantor-kantor bank, serta usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR). (2) Kemudahan-kemudahan dalam memperluas bank devisa, pendirian bank campuran, dan pembukaan kantor cabang bank asing. (3) Terbukanya peluang bagi pemanfaatan dana-dana dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada bank swasta dan lembaga keuangan lainnya. Dampak dari dikeluarkannya Paket kebijakan 27 Oktober ini adalah munculnya bank-bank baru yang disertai dengan bertambahnya kantor-kantor cabang baru serta meningkatkan jumlah deposito pada tahun-tahun tersebut sampai dengan 50-60% yang memacu kenaikan GNP dan jumlah uang beredar (JUB) (Sakhowi 2002). Di sisi lain peningkatan angka pertumbuhan memacu terjadinya peningkatan inflasi yang juga memacu peningkatan defisit anggaran belanja. Keadaan ini terlihat juga pada perkembangan paling dinamis terutama terlihat pada perbankan swasta nasional. Jika sebelum deregulasi terdapat 66 bank swasta nasional, maka pada tahun 1996 terdapat 164 bank. Kondisi ini membuat persaingan antar bank menjadi semakin tajam terutama dalam hal menarik nasabah baik berupa pengumpulan dana maupun pada saat penyaluran dananya. Penambahan jumlah bank swasta nasional serta jumlah kantor cabang baru tersebut juga dimungkinkan bagi pendirian bank swasta nasional baru dan juga bagi kantor cabang bank asing.

Perkembangan perbankan di Indonesia mengalami kemunduran akibat krisis moneter yang melanda pada pertengahan 1997. Penyebab dari krisis moneter tersebut merupakan proses integrasi perekonomian Indonesia ke perekonomian global yang

berlangsung dengan cepat. Faktor lain yang berperan adalah kelemahan fundamental mikroekonomi yang tercermin dari kerentangan sektor keuangan nasional, khususnya sektor perbankan. Hal ini mengakibatkan adanya sistem pengawasan yang kurang efektif dari bank sentral karena belum dapat mengimbangi pesat dan kompleksnya kegiatan operasional perbankan. Relatif lemahnya kemampuan manajerial bank telah mengakibatkan penurunan kualitas aktiva produktif, peningkatan resiko yang dihadapi perbankan dan juga kurang transparansinya informasi mengenai perbankan. Kondisi tersebut mengakibatkan pula kesulitan dalam melakukan analisis secara akurat tentang kondisi keuangan suatu bank, melemahnya upaya untuk melakukan kontrol sosial dan menciptakan disiplin pasar. Kegagalan keuangan yang juga merupakan dampak dari kegagalan ekonomi membuat bank tidak mampu membayar kewajiban *financialnya* pada saat jatuh tempo. Kondisi ini menyebabkan banyak bank tidak mampu mempertahankan kelangsungan usahanya tanpa diketahui lebih awal. Akibat krisis moneter juga berakibat pada *negatif spread* dan peningkatan kredit bermasalah pada bank-bank pada umumnya. Hal ini mengakibatkan kerugian besar dan penurunan modal karena harus menutup setiap kerugian tersebut. Penurunan modal dan sekaligus peningkatan kredit bermasalah tersebut berarti pula mengakibatkan penurunan kecukupan modal.

Selain adanya permasalahan-permasalahan tersebut di atas, usaha yang harus dihadapi perbankan juga tidak bisa dilepaskan dari berbagai macam resiko dalam menjalani operasinya. Resiko usaha perbankan ini merupakan tingkat ketidakpastian mengenai suatu hasil yang diperkirakan atau diharapkan diterima. Untuk

meminimumkan tingkat resiko ini maka perbankan perlu bertindak rasional dalam memperhatikan masalah efisiensi. Masalah efisiensi dirasakan sangat penting pada saat ini dan di masa mendatang, karena antara lain disebabkan oleh: (1) permasalahan yang timbul sebagai akibat berkurangnya sumber daya; (2) kompetisi yang bertambah kuat dan ketat; (3) meningkatnya standar kepuasan konsumen (Sakhowi 2002). Oleh karena itu analisis efisiensi perlu dilakukan untuk mengetahui dan menentukan penyebab perubahan tingkat efisiensi serta mengambil tindakan korektif supaya terlaksana peningkatan efisiensi. Efisiensi dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara keluaran (output) dengan masukan (input) atau dengan kata lain jumlah keluaran yang dihasilkan dari satu input yang dipergunakan. Suatu perusahaan dapat dikatakan efisien apabila (1) mempergunakan jumlah unit input yang lebih sedikit dibandingkan unit input yang digunakan perusahaan lain untuk menghasilkan jumlah output yang sama; (2) menggunakan jumlah unit input yang sama tetapi dapat menghasilkan output yang lebih besar.

Penggunaan rasio keuangan pada sektor perbankan di Indonesia dengan lebih difokuskan pada analisa kesehatan perbankan yang lebih dikenal dengan analisa CAMEL. CAMEL adalah analisa yang berunsurkan variabel-variabel *Capital Adequacy Rate, Asset Quality, Management, Earning* dan *Liquidity*. Pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis rasio CAMEL pada perusahaan perbankan dengan membandingkan tingkat efisiensi kinerja antara bank BUMN dan bank swasta nasional.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Analisis Efisiensi Kinerja antara Bank BUMN & Bank Umum Swasta Nasional Di Indonesia.**

1.2 Perumusan Masalah

Pada penelitian ini dirumuskan permasalahan tentang bagaimanakah efisiensi kinerja antara bank BUMN dan bank Swasta Nasional di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis efisiensi kinerja antara bank BUMN dan bank Swasta Nasional di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Memberikan pertimbangan bagi perusahaan perbankan dalam mengambil keputusan yang mempengaruhi kinerja perbankan.
2. Sebagai informasi tambahan dalam mempertimbangkan bank yang akan dipilih untuk mengelola dana yang menggunakan jasa perbankan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan di bagi menjadi 7 bab yaitu :

BAB. I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB. II TINJAUAN UMUM SUBYEK PENELITIAN

Bab ini berisi tentang uraian secara umum atas subyek penelitian.

BAB. III KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya serta letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

BAB. IV LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

Bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang di teliti, terutama teori mengenai lembaga keuangan perbankan dan teori-teori yang berhubungan dengan analisis CAMEL pada perbankan di Indonesia.

BAB. V METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang data-data dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB. VI ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang analisis data secara statistik dan analisis pembahasan mengenai efisiensi kinerja antara bank BUMN dan bank Swasta Nasional di Indonesia.

BAB. VII KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Bab ini berisikan tentang simpulan dari hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB II

TINJAUAN UMUM SUBYEK PENELITIAN

2.1. Perkembangan Lembaga Keuangan Bank

Krisis ekonomi 1998 yang bermula dari krisis moneter yang mulai terjadi pada pertengahan tahun 1997. Lembaga keuangan yang paling awal terkena dampaknya adalah bank. Hal ini bukan saja disebabkan oleh merupakan lembaga keuangan terbesar dan terluas di Indonesia, melainkan juga pengelolaan perbankan di Indonesia selama sebelum terjadinya krisis kurang mengindahkan kaidah-kaidah manajemen dan peraturan-peraturan perbankan. Tetapi sejak tahun 1999 dengan dibuatnya undang-undang baru Bank Indonesia untuk mengawasi dan membina bank-bank, maka pengelolaan perbankan sudah menjadi lebih baik. Berikut ini merupakan data-data yang menunjukkan perkembangan jumlah bank dan kantor bank selama kurun waktu 2000-2003.

Tabel 2.1
Perkembangan Jumlah Bank dan Kantor Bank di Indonesia

No	Keterangan	2000	2001	2002
1	Bank Umum			
	Jumlah Bank	151	145	141
	Jumlah Kantor	6509	6765	7001
2	Bank BUMN			
	Jumlah Bank	5	5	5
	Jumlah Kantor	1736	1807	1885
3	BPD			
	Jumlah Bank	26	26	26
	Jumlah Kantor	826	857	909
4	BUSN Devisa			
	Jumlah Bank	38	38	36
	Jumlah Kantor	535	556	528
5	BUSN Non Devisa			
	Jumlah Bank	43	42	40
	Jumlah Kantor	535	556	528
6	Bank Campuran			
	Jumlah Bank	29	24	24
	Jumlah Kantor	57	53	53
7	Bank Asing			
	Jumlah Bank	10	10	10
	Jumlah Kantor	53	61	62

Sumber : Kajian Kontekstual Indonesia, 2003

Pada tabel 2.1 memperlihatkan bahwa jumlah bank secara keseluruhan mengalami penurunan dari 151 pada tahun 2000 menjadi 141 pada tahun 2002. Penurunan ini bersumber dari berkurangnya bank swasta nasional dan bank campuran. Penurunan ini jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan tahun 1998-1999. Pada tahun 1998 jumlah bank mencapai 208 dengan jumlah kantor 7.532. Pada tahun 1999 jumlahnya menurun drastis, menjadi hanya 164. Sebanyak 44 bank yang berhenti beroperasi terdiri atas 38 BUSN, 4 bank campuran, 1 BPD, dan adanya *merger* Bank Persero. Semakin menurunnya tingkat pengurangan bank umum memberikan indikasi makin stabilnya industri perbankan. Kesimpulan itu juga diperkuat dengan data semakin meningkatnya jumlah kantor bank dari 6.509 pada tahun 2000 menjadi 7.001 pada tahun 2002.

Perkembangan jumlah bank dan kantor bank di Indonesia berdasarkan wilayah (pulau), selama periode 1998-2003 dapat terlihat pada tabel 2.2 berikut ini

Tabel 2.2
Perkembangan Jumlah Bank dan Kantor Bank di Indonesia
Berdasarkan Wilayah

Wilayah (Pulau)	Jumlah Bank				Jumlah Kantor Bank			
	1998		2003		1998		2003	
	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
Sumatra	9	5,4	9	6,4	791	13,3	847	14,0
Jawa	141	84,4	115	82,1	4.136	69,5	4.193	69,4
Nusa Tenggara	7	4,2	6	4,3	336	5,6	287	4,7
Kalimantan	4	2,4	4	2,9	275	4,6	293	4,8
Sulawesi	4	2,4	4	2,9	316	5,3	317	5,2
Maluku & Papua	2	1,2	2	1,4	99	1,7	109	1,8
Total	167	100,0	140	100,0	5.953	100,0	6.046	100,0

Sumber : diolah dari *Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia*

Pada tabel 2.2 menunjukkan bahwa selama periode 1998 – 2003 bank-bank umum yang ada masih terkonsentrasi di pulau Jawa. Sampai dengan tahun 2003, bank-bank yang beroperasi di Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Dari 140 bank yang beroperasi di Indonesia, 82% di antaranya beroperasi di Pulau Jawa. Tetapi dari seluruh bank umum yang beroperasi di Pulau Jawa sebanyak 94 buah atau 82% di antaranya beroperasi di Provinsi DKI Jakarta. Ketimpangan distribusi bank umum juga terjadi dalam distribusi jumlah kantor bank. Sampai tahun 2003, hampir 70% kantor bank yang ada di Indonesia beroperasi di Pulau Jawa.

2.2. Kinerja Lembaga Keuangan Bank

Selain melambatnya tingkat pengurangan bank, periode 2000-2002 juga menunjukkan adanya perbaikan kinerja seperti terlihat pada tabel 2.3 berikut ini (Manurung, 2005):

Tabel 2.3
Perkembangan Kinerja Perbankan Tahun 1998-2002

(dalam trilyun Rp.)

Keterangan	1998	1999	2000	2001	2002
Total <i>Assets</i>	895,5	1.006,70	1.030,35	1.099,7	1.112,2
Dana Pihak ke-3	625,3	617,6	699,1	797,4	835,8
Kredit	545,5	277,3	320,4	358,6	410,3
Modal	-129,8	-41,2	53,5	62,3	93
Laba (rugi) sebelum pajak	-178,6	75,4	10,5	13,1	21,9
Pendapatan bunga netto	-61,2	-38,6	22,8	37,8	42,9

Selain mengalami masa-masa sulit pada tahun 1998-1999 yang ditandai dengan negatifnya modal dan besarnya kerugian serta negatifnya pendapatan bunga, memasuki tahun 2000 perbankan sudah mulai mencapai kondisi yang relatif membaik. Total aktiva pada tahun 2002 melebihi angka Rp.1.100 trilyun. Sementara modal sudah meningkat mencapai Rp.93.trilyun. Dengan demikian, syarat kecukupan modal diukur dengan rasio ($\text{Modal/Total Assets}$) yang harus 8% atau lebih, pada tahun 2002 telah terpenuhi. Dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun juga meningkat cukup pesat dari sekitar Rp.625 trilyun pada tahun 1998 menjadi hampir mencapai Rp.836 trilyun pada tahun 2002.

Beberapa indikasi masalah yang muncul adalah belum pulih sepenuhnya fungsi intermediasi perbankan, terutama penyaluran kredit pada masyarakat. Jumlah kredit yang disalurkan pada tahun 2002 mencapai Rp.410 trilyun. Meskipun jumlah ini merupakan peningkatan secara konsisten sejak tahun 1999, nilainya masih jauh lebih kecil dibanding dengan tahun 1998 yang masih di atas Rp.500 trilyun. Rasio

kredit atau total *assets* pada tahun 2002 hanya 37%, yang artinya total kredit yang disalurkan perbankan hanya merupakan 37% total total *assets*. Pada kondisi normal rasio ini umumnya mencapai sekitar 70% atau setidaknya-tidaknya 60%. Dengan demikian jumlah kredit yang disalurkan pada tahun 2002 jauh di bawah kondisi normal dan ini merupakan salah satu petunjuk belum pulihnya fungsi intermediasi perbankan.

Perkembangan beberapa indikator kinerja seluruh bank umum di Indonesia dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini:

Table 2.4
Perkembangan Kinerja Bank Umum Di Indonesia
Tahun 1998-2002

	1998	1999	2000	2001	2002
<i>Return on Assets (ROA)</i>	-20	7	1	1	2
<i>Return on Equity (ROE)</i>	-	-	20	21	24
<i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i>	-14	-4	5	6	8
<i>Loans To Deposit Ratio (LDR)</i>	87	45	46	45	49
<i>Net Interest Margin (NIM)</i>	-7	-4	2	3	4
<i>Porsi Kredit (% Aktiva)</i>	61	28	31	33	37

Sumber : Diolah dari *Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia*

Angka ROA dan ROE pada tahun 1998-1999 sangat buruk, yang menunjukkan sangat buruknya profitabilitas Bank Umum. Namun selama periode 2000-2002 angka-angkanya sudah membaik atau melebihi standar yang ditetapkan Bank Indonesia. Angka ROA mencapai standar BI ($\geq 2\%$) pada tahun 2002, sedangkan ROE yang sesuai dengan standar BI ($\geq 12\%$) dicapai dua tahun lebih cepat. Demikian halnya dengan angka CAR yang memberikan gambaran tentang kesehatan permodalan bank, pada 1998-1999 menunjukkan angka yang negatif. Tetapi pada tahun 2000, permodalan bank umum sudah dapat dikatakan sehat

kembali, karena angka CAR tahun 2002 adalah 8%, telah sesuai dengan standar Bank Indonesia, $\geq 8\%$. Sedangkan angka NIM yang memberikan gambaran tentang resiko bunga dan sekaligus profitabilitas sudah mencapai angka positif sejak tahun 2002. dilihat dari perkembangan ketiga rasio diatas, tingkat resiko usaha maupun tingkat profitabilitas bank umum, memasuki tahun 2000 mengalami perbaikan yang sangat signifikan.

Yang masih memprihatinkan adalah belum pulihnya fungsi intermediasi bank umum. Hal ini dilihat dari angka porsi kredit yang masih $< 40\%$ total aktiva. Angka ini masih jauh lebih rendah disbanding angka tahun 1998 yang mencapai 61%. Dalam kondisi normal porsi kredit mencapai 70% - 80% total aktiva. Belum pulihnya fungsi intermediasi bank umum menyebabkan masih banyak dana bank umum yang menganggur. Hal ini dapat dilihat dari rasio LDR yang hanya sekitar 49%. Dalam kondisi normal dan berdasarkan ketentuan BI, angka LDR seharusnya berada disekitar 85% sampai 110%.

2.3. Bank

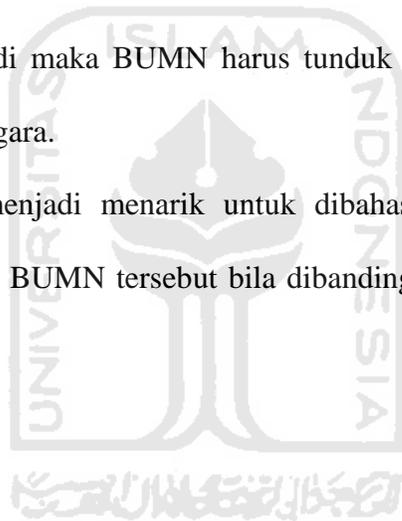
Pengelolaan bank yang baik yang mendasarkan pada aturan tentang kesehatan bank yang disusun oleh Bank Sentral. Aturan tersebut berlaku bagi yang beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. Tidak terkecuali bank BUMN yang modalnya dimiliki oleh pemerintah. Saat ini terdapat lima bank BUMN, yaitu Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Ekspor Indonesia. Dari kelima Bank BUMN tersebut empat di

antaranya merupakan bank umum, yaitu Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Tabungan Negara (BTN). Sedangkan Bank Ekspor Indonesia merupakan bank khusus menyediakan berbagai fasilitas *trade financing* dengan pola *refinancing* dan *co-financing* melalui dan bersama Bank BUMN. Karakteristik khusus Bank BUMN yang membedakannya dengan bank lain adalah sebagai badan usaha yang didirikan oleh Negara. Walaupun memiliki persamaan bentuk hukum dengan bank swasta nasional, yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), namun sampai dengan saat ini belum dapat dikelola layaknya sebagai suatu badan usaha privat.

Dua karakteristik khusus yang mempengaruhi pengelolaan Bank BUMN. Pertama dari sisi kelembagaan. Berdasarkan UU No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bank BUMN merupakan perusahaan perseroan (PERSERO) karena seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh negara. Menurut UU BUMN, PERSERO didirikan dengan tujuan untuk mengejar keuntungan (*profit oriented*). Namun di sisi lain UU BUMN membuka kemungkinan bagi pemerintah untuk memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum (*public service*). Adanya dua ketentuan dengan semangat yang berbeda tersebut membuat posisi BUMN menjadi dilematis. Dari kacamata politik, BUMN juga sering diposisikan sebagai subordinasi birokrasi di bawah pemerintah. Masalah struktural institusional yang mendasar memuat BUMN tidak berdaya meskipun dikirim pimpinan yang berkualitas. Hal itu disebabkan karena belenggu politik dan perilaku oknum di dalam institusi negara,

pemerintah, parlemen, dan birokrat yang membuat posisinya pun menjadi sulit sehingga tidak ada ruang kreasi yang baik. Kedua dari sisi permodalan, Bank BUMN didirikan dengan modal dari kekayaan negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN. Untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaan kekayaan negara tersebut tidak lagi didasarkan pada sistem APBN namun berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Karena Bank BUMN didirikan dengan modal keuangan negara yang dipisahkan tadi maka BUMN harus tunduk kepada UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Kondisi tersebut menjadi menarik untuk dibahas lebih lanjut bagaimana efisiensi kinerja pada Bank BUMN tersebut bila dibandingkan dengan Bank Swasta Nasional di Indonesia.



BAB III

KAJIAN PUSTAKA

3.1. Kinerja Lembaga Keuangan

Penelitian tentang kinerja telah dilakukan oleh Alamsyah (2002) yang menganalisis dan melihat apakah tujuan rekapitalisasi tersebut telah tercapai dan seberapa jauh masing-masing dapat mengatasi permasalahannya. Keberhasilan tersebut akan dievaluasi berdasarkan kinerja keuangan perusahaan dengan standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, yang dikenal dengan istilah CAMEL selama periode 31 Desember 1999 sampai dengan 31 Desember 2000.

Penelitian tentang kinerja juga telah dilakukan oleh Sakhowi (2005) yang menjelaskan tentang analisis kinerja lembaga keuangan bank di Indonesia. Penelitian ini menggunakan 18 bank sebagai sampel dan jumlah populasi 23 bank yang terdaftar di BEJ. Metode penelitian yang digunakan berdasarkan pada metode alat analisis pengukuran efisiensi. *Data Envelopment Analysis* (DEA), yang digunakan untuk menganalisis efisiensi teknis bank-bank *go public* di Indonesia. Data *input* dan *output* yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan intermediasi yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip sistem keuangan di Indonesia. Terdapat 3 variabel *input* dan 3 variabel *output* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu aktiva tetap, jumlah simpanan serta beban tenaga kerja untuk data *inputnya*. Data *output* yang digunakan adalah sejumlah kredit, pendapatan, operasional lainnya serta kas. Secara umum hasil pengujian mengindikasikan bahwa efisiensi teknis serta

pertumbuhan produktivitas berada pada garis batas efisiensi (garis *frontier*). Dari 18 bank yang diuji, terdapat 12 bank yang secara teknis efisien dan hanya 6 bank yang secara teknis tidak efisien dengan tingkat efisiensi yang dicapai oleh masing-masing bank tersebut sangat beragam. Penyebab terjadinya ketidakefisienan terutama oleh penggunaan sumber daya input yaitu aktiva tetap yang tidak proporsional.

Sejalan dengan penelitian yang terkait efisiensi telah dilakukan Ariesanti (2000) yang melakukan studi tingkat efisiensi melalui perbandingan besar perusahaan dan efek krisis ekonomi dengan hasil penelitian yang menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan besar tidak berbeda bila dibandingkan dengan perusahaan kecil (untuk tahun 1996 hanya 2 dari 6 rasio yang menunjukkan perbedaan efisiensi dan untuk tahun 1998 hanya 1 dari 6 rasio yang menunjukkan perbedaan efisiensi). Efisiensi pada perusahaan besar terjadi pula pada perusahaan kecil, walaupun mungkin diperoleh dengan cara yang berbeda. Antara perusahaan besar dan perusahaan kecil mempunyai celah efisiensi masing-masing. Perusahaan besar mempunyai keunggulan *cost* untuk memperoleh skala ekonomis dengan menerapkan teknologi produksi yang padat modal. Sebaliknya, perusahaan kecil lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan permintaan (Chappell et al, 1993 dan Das et al, 1993 dalam Ariesanti, 2000) dengan menggunakan teknik produksi yang mudah berubah untuk menyesuaikan dengan keadaan.

3.2. Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio adalah salah satu cara pemrosesan dan penginterpretasian informasi akuntansi yang dinyatakan dalam artian relatif maupun absolut untuk menjelaskan hubungan tertentu antara angka yang satu dengan yang lain dari suatu laporan keuangan. Analisis rasio keuangan dapat dipakai sebagai sistem peringatan awal (*early warning system*) terhadap kemunduran kondisi keuangan dari suatu perusahaan. Analisis rasio dapat membimbing investor membuat keputusan atau pertimbangan tentang apa yang akan dicapai oleh perusahaan dan bagaimana prospek yang akan dihadapi di masa yang akan datang.

Beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan analisis rasio telah dilakukan oleh Altman (1965), Libby (1975) dalam (Ariesanti, 2002) yang menunjukkan bahwa rasio keuangan memberikan manfaat untuk mengukur, menilai atau memprediksi keadaan suatu perusahaan, memprediksi kebangkrutan. Machfoedz (1999a) melakukan penelitian mengenai penggunaan rasio keuangan untuk menilai kinerja perusahaan yang *go public* di pasar modal ASEAN, dengan menggunakan rasio likuiditas, *leverage*, profitabilitas dan profitabilitas internal.

Penggunaan rasio keuangan pada sektor perbankan di Indonesia dengan lebih difokuskan pada manfaat untuk mengukur, menilai, atau memprediksi keadaan perusahaan; untuk memprediksi kebangkrutan (Altman, 1968 dan Libby, 1975 dalam Ariesanti, 2000); memprediksi target *takeover* (Palepu, 1986 dalam Ariesanti, 2000). Penelitian yang dilakukan oleh Machfoedz (1999a) memberi gambaran mengenai penggunaan rasio keuangan untuk menilai kinerja perusahaan yang *go public* di

pasar modal ASEAN. Rasio yang digunakan dikelompokkan menjadi empat, yaitu likuiditas, *leverage*, profitabilitas, dan profitabilitas internal. Seperti penelitian sebelumnya Machfoedz (1999b), Ariesanti (2000) melakukan pengukuran efisiensi dengan 6 rasio keuangan yang dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu rasio profitabilitas, rasio *leverage*, rasio likuiditas dan operasi.

3.3. Bank BUMN dan Bank Swasta Nasional Di Indonesia

Perbankan dalam kegiatan usahanya mendasarkan pada kepercayaan, maka untuk menjaganya penting untuk melakukan pengelolaan usahanya dengan baik. Pengelolaan bank yang baik dapat dilakukan dengan menjaga keseimbangan antara pemeliharaan likuiditas yang cukup dengan pencapaian profitabilitas yang wajar. Likuiditas dalam dunia perbankan mengandung makna sebuah kemampuan bank untuk dapat memenuhi kewajiban sekarang maupun kewajiban di masa yang akan datang. Ketiadakaan alat likuid yang dibutuhkan menyebabkan runtuhnya kepercayaan nasabah, bahkan krisis beberapa waktu yang lalu telah membuktikan bagaimana rapuhnya perbankan nasional yang salah satunya disebabkan oleh aspek pengelolaan likuiditas yang lemah. Namun di sisi kemampuan bank untuk mendapatkan keuntungan juga penting untuk dapat mengindikasikan kemampuan bank untuk keluar dari permasalahan yang menimpa lembaga keuangan yang bersangkutan. Di satu sisi menjaga aset-aset likuid bagi sebuah bank akan menimbulkan biaya (*cost of maintaining level of liquidity*) yang tak lain merupakan *opportunity cost* karena kehilangan kesempatan memperoleh *yield* yang lebih tinggi

dari penempatan di aktiva non likuid, namun di sisi lain apabila terjadi kekurangan aktiva likuid akan menimbulkan biaya pula (*cost of insufficient liquidity*).

Penelitian dengan obyek Bank BUMN pernah dilakukan oleh Aristanto (2005) yang melakukan pengamatan terhadap data-data indikator likuiditas dan profitabilitas pada Bank BUMN dengan menunjukkan hasil bahwa rasio Giro Wajib Minimum (GWM) secara rata-rata tahun 2003 dan 2004 melebihi batas pemenuhan likuiditas oleh Bank Indonesia sebesar 5 %. Hal ini menunjukkan kondisi tersebut, dapat dikatakan bahwa bank BUMN mengalami kelebihan likuiditas yang menunjukkan *idle funds* bank yang cukup besar. Di lihat dari nilai LDR secara rata-rata Bank BUMN tahun 2003 dan 2004 masih berada di level 70% dari kemampuan bank sebelum krisis dengan LDR yang berada di level 90%. Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan terjadinya hambatan bank dalam menyalurkan kredit (mengkonversi aktiva likuid ke dalam bentuk kredit).

Penelitian dengan obyek Bank Umum Swasta Nasional telah dilakukan oleh Setyowati dan Suharjanto (2005) yang melakukan analisis data dan pembahasan terhadap tiga kelompok Bank Umum Swasta Nasional dengan hasil berupa: (1) terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok bank yang tidak ikut program rekapitalisasi, dan kelompok bank yang dilikuidasi. Dari 75 rasio keuangan yang tergolong sebagai rasio antara laporan terdapat 20 rasio keuangan yang signifikan sebagai variable pembeda yang membentuk fungsi diskriminan. (2) Hasil klasifikasi berdasarkan fungsi diskriminan tersebut memberikan prosentase kebenaran

pengklasifikasian secara original sebesar 100% dan secara *cross validated* sebesar 98,8%.

Studi ini dilakukan untuk meneliti kembali dan mengembangkan penelitian yang dilakukan Machfoedz (1999b), Ariesanti (2000). Perbedaan studi ini dengan sebelumnya adalah pada penelitian sebelumnya pemilihan periode saat krisis dan membandingkan tingkat efisiensi perusahaan besar dengan perusahaan kecil, sementara pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis rasio CAMEL pada perusahaan perbankan dengan membandingkan tingkat efisiensi kinerja antara Bank BUMN dan Bank Swasta Nasional.



BAB IV

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

4.1. Lembaga-lembaga Keuangan

Lembaga keuangan (*financial intituion*) adalah lembaga yang kegiatan utamanya mengumpulkan dan menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (unit surplus) kepada pihak yang membutuhkan dana (unit defisit). Unit surplus yaitu pihak-pihak yang memiliki dana yang untuk jangka waktu pendek (kurang dari/sama dengan 1 tahun) ataupun jangka panjang (lebih besar dari 1 tahun) yang belum menggunakan uangnya, yaitu pada empat unit ekonomi berupa: sektor rumah tangga, perusahaan, pemerintah dan luar negeri. Unit defisit yaitu pihak-pihak yang menggunakan dana-dananya untuk kegiatan konsumsi atau kegiatan-kegiatan yang diharapkan dapat memberi manfaat pada saat ini dan atau di masa mendatang. Rumah tangga, perusahaan maupun pemerintah di luar perekonomian suatu negara juga seringkali mengalami kekurangan dana, dan alasannya pun seringkali sama dengan rumah tangga, perusahaan dan pemerintah di perekonomian suatu negara. Oleh karena itu juga dapat memperoleh dana yang dibutuhkan dari lembaga-lembaga keuangan (Manurung, 2004:109).

Menurut Susilo (2000) peranan lembaga keuangan sangat penting dalam sistem keuangan yaitu:

1. Pengalihan aset (*assets transmutation*)

Lembaga keuangan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

2. Transaksi (*transaction*)

Lembaga keuangan memberikan kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Produk-produk yang dikeluarkan (giro, tabungan, deposito, saham dan lainnya) yang merupakan pengganti dari uang dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran.

3. Likuiditas (*liquidity*)

Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimiliki dalam bentuk produk berupa giro, tabungan, deposito dan lainnya. Produk-produk tersebut masing-masing mempunyai tingkat likuiditas yang berbeda-beda untuk kepentingan pemilik dana. Unit surplus dapat menempatkan dananya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan.

4. Efisiensi (*efficiency*)

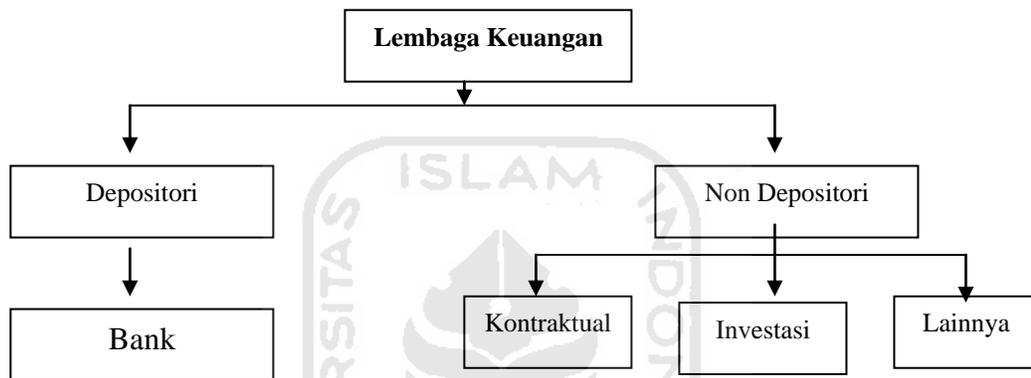
Meningkatkan pertemuan unit surplus dengan unit defisit secara tidak langsung. Lembaga keuangan memberikan kelancaran dan mempertemukan dengan pihak-pihak yang berkepentingan.

4.2. Klasifikasi Lembaga-Lembaga Keuangan

Lembaga-lembaga keuangan dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu lembaga keuangan bank dan non bank, lembaga keuangan mikro,

lembaga keuangan formal dan informal. Skema di bawah ini menunjukkan salah satu klasifikasi lembaga keuangan di sesuaikan berdasarkan ketentuan atau undang-undang yang berlaku di Indonesia (Manurung, 2004:117):

GAMBAR 4.1.
Klasifikasi Lembaga Keuangan Di Indonesia



Berdasarkan batasan kegiatan pengumpulan dan penyaluran danaya, lembaga-lembaga keuangan di kelompokkan menjadi lembaga keuangan depositori (*depository financial institution*) dan lembaga keuangan non depositori (*non depository financial institution*). Lembaga keuangan depositori adalah lembaga keuangan yang diperbolehkan mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk deposito. Dalam prakteknya yang boleh mengumpulkan dana dalam bentuk deposito dari masyarakat hanyalah lembaga perbankan. Itu sebabnya lembaga keuangan depositori lebih dikenal sebagai lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan non depositori tidak diperbolehkan mengumpulkan dana dalam bentuk deposito dari masyarakat, karenanya lembaga keuangan non depositori disebut juga sebagai lembaga keuangan

non bank (LKNB) atau ada juga yang menyebut sebagai lembaga keuangan bukan bank (LKBB).

Lembaga keuangan mikro (*mikro finance institution*) merupakan lembaga yang memberikan bantuan keuangan kepada individu atau kelompok usaha kecil. Di Indonesia yang termasuk lembaga keuangan mikro antara lain adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR), koperasi simpan pinjam, dan pegadaian (*pawn shop*). Lembaga keuangan mikro dapat merupakan lembaga keuangan bank dan non bank. Sumber dana lembaga keuangan mikro tidak selalu berasal dari masyarakat kelompok kecil, tetapi kebanyakan berasal dari lembaga keuangan lain yang jauh lebih besar seperti bank-bank umum. Tidak jarang juga sebuah lembaga keuangan mikro merupakan anak perusahaan sebuah lembaga keuangan yang besar.

Lembaga keuangan formal beroperasi berdasarkan kekuatan hukum. Itu sebabnya untuk melakukan transaksi, prosedurnya sangat ketat dan formal. Keketatan prosedur dan formalitas tersebut dapat membuat banyak kelompok masyarakat tidak dapat meminjam atau menyimpan dana dari lembaga keuangan formal. Itu sebabnya mencari dana dari sumber alternatif yang disebut sebagai lembaga keuangan informal. Lembaga keuangan informal adalah lembaga keuangan yang beroperasi tanpa kekuatan hukum formal. Prosedur transaksi sangat sederhana dan informal. Contoh lembaga keuangan informal, terutama yang beroperasi di Indonesia yaitu arisan, ijon dan rentenir. Oleh karena resiko yang dimiliki para pengelola lembaga keuangan informal sangat besar, seperti tidak adanya jaminan hukum atas keamanan uang yang dipinjamkan, sehingga membebankan biaya bunga yang tinggi, namun

karena prosedur yang cepat dan sederhana lembaga keuangan informal tetap memiliki daya tarik bagi masyarakat yang tidak mungkin memperoleh dana dari lembaga keuangan formal.

4.3. Lembaga Keuangan Bank

Bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana deposito dan memberikan kredit pinjaman. Definisi bank menurut Undang-undang Perbankan Indonesia (UU No.7/1992 tentang perbankan pasal 1 ayat 1) adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut Iswardono (1996:49) lembaga keuangan sebagai perantara pihak-pihak yang kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dana dan memerlukan dana (*lack of funds*). Oleh karena itu antara bank dan masyarakat saling membutuhkan dan mempunyai peranan yang sangat penting.

Lembaga keuangan yang sampai saat ini paling besar adalah perbankan. Kelebihan perbankan yang utama dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya adalah diizinkan mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk deposito. Posisi perbankan juga sangat strategis, karena merupakan lembaga keuangan yang paling utama yang diandalkan pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan moneter.

Bank sebenarnya hanya terdiri dari dua jenis yaitu bank sentral dan bank komersial. Bank komersial beroperasi dengan tujuan memperoleh laba. Sedangkan

bank sentral adalah bank pemerintah yang tugas utamanya adalah mengatur jumlah uang beredar dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian makro.

Di Indonesia pengelompokan lembaga perbankan terus disempurkan. Klasifikasi bank di Indonesia ditetapkan berdasarkan fungsi, kepemilikan dan status. Berdasarkan fungsinya klasifikasi perbankan di Indonesia sudah semakin disederhanakan. Saat ini terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat. Sebelumnya klasifikasi perbankan jauh lebih kompleks seperti terlihat pada tabel di bawah ini:

TABEL 4.1.
Klasifikasi Perbankan Di Indonesia

UU No.14/1967	UU No.7/1992
Bank Umum	Bank Umum :
Bank Pembangunan	* Bank Konvensional
Bank Tabungan	* Bank Syariah
Bank Pasar	Bank Perkreditan Rakyat :
Bank Desa	* Bank Konvensional
Bank Lainnya	* Bank Syariah

Berdasarkan UU No.14/1967 bank di Indonesia dikelompokkan menjadi bank umum, bank pembangunan, bank tabungan, bank pasar, bank desa, dan bank lainnya. Dalam prakteknya pengelompokkan ini kurang efektif, karena fungsi antara satu bank dengan bank lainnya seringkali tumpang tindih. Karena itu berdasarkan UU No.7/1992 tentang perbankan pengelompokkan bank disederhanakan menjadi bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR). Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Perkembangan terbaru dalam dunia perbankan di Indonesia adalah mulai diberlakukannya penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan bank umum dan bank perkreditan rakyat di Indonesia. Penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan perbankan di Indonesia berdasarkan UU No.7/1992 merupakan pilihan, dalam arti bank boleh menggunakan prinsip konvensional dan atau prinsip syariah. Oleh karena terdapat bank yang tetap menjalankan pengelolaannya dengan menggunakan sistem konvensional (menerapkan sistem bunga), tetapi juga membuka unit-unit kegiatan yang dikelola berdasarkan prinsip syariah. Perbedaan paling prinsip antara bank yang dikelola dengan prinsip syariah dibanding bank konvensional adalah dalam bank syariah tidak diterapkan sistem bunga. Hal ini dilandaskan pada ajaran agama Islam yang mengharamkan riba. Penerapan bank syariah ini menambah alternatif pilihan masyarakat dalam menyimpan uang atau aset finansialnya.

Dilihat dari sisi kepemilikannya, bank dapat dibedakan menjadi bank nasional, bank asing dan bank campuran. Bank Nasional adalah bank yang sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia. Bank asing adalah bank yang sekalipun beroperasi di Indonesia namun sahamnya dimiliki oleh warga negara lain. Bank campuran adalah bank yang sahamnya dimiliki warga negara Indonesia dan asing. Bank Nasional

terdiri atas bank yang dimiliki pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta nasional dan koperasi.

Di lihat dari status bank dapat dibedakan menjadi bank devisa dan bank non devisa. Bank devisa adalah bank yang diizinkan melakukan transaksi devisa. Sedangkan bank non devisa adalah bank yang tidak diizinkan melakukan transaksi non devisa.

4.4 Evaluasi Kinerja Bank Umum

Kinerja keuangan bank merupakan bagian dari kinerja bank secara keseluruhan. Kinerja (*performance*) bank secara keseluruhan merupakan gambaran prestasi yang dicapai bank dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia. Kinerja keuangan suatu bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas bank.

Evaluasi kinerja atau kesehatan bank umum bertujuan untuk mengetahui kesehatan dan masa depan bank atau perbankan secara keseluruhan. Evaluasi tersebut dibutuhkan karena mempertimbangkan pihak-pihak yang terkait, yaitu pemilik bank itu sendiri, para pengelola, masyarakat pengguna jasa bank, dan pemerintah khususnya bank sentral. Bank umum yang sehat atau kinerjanya baik merupakan tiang utama penopang daya tahan perekonomian nasional maupun dunia. Bila sistem

perbankan suatu negara dalam kondisi baik/sehat, maka pemerintah atau bank sentral memiliki mitra yang dapat diandalkan dalam pelaksanaan dalam kebijakan ekonomi, khususnya kebijakan moneter. Masyarakat pengguna jasa bank dapat meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya keuangan tanpa harus khawatir kehilangan uangnya. Bagi para pemilik bank yang baik/sehat merupakan bukti bahwa investasinya tidak sia-sia. Sedangkan bagi para pengelola kesehatan bank menjamin kepastian masa depan karirnya.

Evaluasi kinerja/kesehatan bank umum ada kaitannya dengan resiko yang dihadapi oleh bank umum. Dengan mengevaluasi kinerja bank umum, resiko-resiko usaha tersebut dapat dikelola dengan baik. Untuk mengetahui apakah kondisi suatu bank umum sehat atau tidak sehat serta masalah-masalah yang diperkirakan akan dihadapi, evaluasi kinerja bank umum dilakukan dengan menghitung rasio-rasio finansial. Resiko yang dihadapi bank umum ada lima macam, yaitu (Manurung, 2004:150):

a. Resiko Kredit (*Credit Risk*)

Resiko kredit sering juga disebut resiko gagal tagih (*default risk*) yaitu resiko yang dihadapi karena ketidakmampuan nasabah membayar bunga kredit dan pokok pinjaman. Resiko ini akan semakin besar bila bank umum tidak mampu meningkatkan atau memperbaiki kualitas kredit yang disalurkan. Umumnya resiko ini akan semakin besar bagi bank-bank yang sangat ekspansif menyalurkan kredit, sehingga mengabaikan kualitas kredit.

b. Resiko Likuiditas (*Liquidity Risk*)

Resiko likuiditas terjadi bila bank tidak mampu menyediakan dana tunai untuk memenuhi kebutuhan transaksi para nasabah dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dilunasi dalam tempo kurang dari satu tahun. Resiko likuiditas berkaitan dengan struktur aktiva dan pasiva bank umum. Di sisi aktiva misalnya sebuah bank umum yang memiliki sekuritas pasar modal atau aktiva tetap dalam porsi sangat besar, akan semakin potensial menghadapi resiko likuiditas. Di sisi pasiva jika sumber dana yang berasal dari pinjaman terlalu besar, maka potensi menghadapi resiko likuiditas juga semakin besar.

c. Resiko Tingkat Bunga (*Interest Rate Risk*)

Resiko tingkat bunga adalah resiko yang dihadapi bank umum karena perubahan tingkat bunga. Perubahan tingkat bunga akan mempengaruhi biaya dana (*cost of fund*) maupun pendapatan bunga (*interest income*). Sebuah bank umum akan menghadapi resiko tingkat bunga bila pendapatan atau biaya bunganya semakin sensitif terhadap perubahan tingkat bunga. Resiko tingkat bunga ini sangat perlu untuk diperhatikan mengingat fluktuatifnya tingkat bunga pasar.

d. Resiko Operasional (*Operational Risk*)

Resiko operasional adalah resiko yang berkaitan dengan kemampuan pengelolaan umum. Jika kemampuan manajemen sebuah bank umum sangat rendah, maka resiko operasional akan semakin banyak dihadapi. Beberapa masalah yang muncul yang memberikan indikasi tentang lemahnya kemampuan manajerial, antara lain adalah cukup banyaknya rencana-rencana kerja yang tidak tercapai

targetnya, suasana kerja yang memburuk, menurun drastisnya tingkat penjualan produk-produk bank yang bersangkutan, dan berpindahnya para nasabah ke bank lain.

e. Resiko Modal (*Capital/Solvency Risk*)

Resiko modal berkaitan dengan ketidakmampuan bank untuk memenuhi komitmen-komitmen usaha, karena ketidakmampuan menyediakan modal yang mencukupi. Gejala ketidakcukupan modal dapat diprediksi dengan melihat besarnya nilai ekuitas bersih. Nilai modal yang negatif menunjukkan bank umum menghadapi masalah besar dengan permodalan. Resiko modal ini biasanya akan dihadapi oleh bank-bank umum yang terlalu mengandalkan dana pihak luar dalam membiayai aktiva-aktivananya.

4.5 CAMEL

Menjadi kewajiban dan wewenang Bank Sentral di seluruh negara untuk menjaga dan mengendalikan kesehatan bank-bank yang ada di dalam industri perbankannya. Untuk melakukan kontrol terhadap tingkat kesehatan bank maka Bank Sentral mewajibkan bank-bank untuk mengirimkan laporan keuangan secara berkala berupa laporan mingguan, triwulanan, semesteran, maupun laporan tahunan. Bagi bank yang dapat menunjukkan tingkat kesehatan yang baik dalam laporan keuangannya maka akan diberikan kesempatan yang lebih luas dalam mengembangkan usahanya. Berbeda dengan bank yang menunjukkan tingkat

kesehatan yang rendah maka Bank Sentral akan memberikan perhatian khusus berupa batasan-batasan dalam operasional bank tersebut.

Kesehatan perbankan adalah kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi suatu kewajiban dengan baik melalui cara-cara yang sesuai dengan aturan perbankan yang berlaku. Kegiatan perbankan tersebut dapat berupa (Susilo, 2000) dalam Suyatmin (2006):

1. Kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, lembaga lain dan dari modal sendiri
2. Kemampuan mengelola dana
3. Kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat
4. Kemampuan memenuhi kewaiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pihak lain
5. Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku.

Perbankan harus mempunyai tingkat kesehatan yang baik agar tetap prima dalam melayani para nasabahnya. Untuk menilai kesehatan suatu bank dapat dilihat dari berbagai segi. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi yang sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat, sehingga Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina bank-bank dapat memberikan arahan atau petunjuk bagaimana bank tersebut harus dijalankan atau bahkan dibubarkan kegiatan operasinya.

Ukuran untuk melakukan penilaian kesehatan bank telah ditentukan oleh Bank Indonesia, di samping itu bank diharuskan membuat laporan baik yang bersifat rutin

maupun yang berkala mengenai seluruh aktivitasnya dalam suatu periode tertentu. Penilaian yang dilakukan Bank Indonesia menggunakan teknik analisa tingkat kesehatan bank yang lazim disebut dengan analisa CAMEL yang disesuaikan terhadap data yang tersedia. CAMEL tidak lagi sekedar mengukur tingkat kesehatan bank, tetapi seringkali digunakan sebagai indikator dalam menyusun peringkat kredibilitas dan memprediksi kebangkrutan bank. Di Indonesia penetapan CAMEL sebagai indikator penilaian tingkat kesehatan bank tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (BI Nomor 26/23/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang tata cara penilaian tingkat kesehatan bank, serta Surat Edaran Gubernur Bank Indonesia Nomor 26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993 tentang tata cara penilaian tingkat kesehatan bank umum dan pada tanggal 30 April 1997 penetapan tersebut perlu dikukuhkan kembali lewat Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997, bahkan juga berlaku untuk menilai tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat.

Faktor-faktor yang dinilai untuk menentukan tingkat kesehatan bank menurut kriteria Bank Indonesia dengan ketentuan terbarunya yang dikukuhkan lewat SK Direksi Bank Indonesia Nomor 30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 antara lain adalah sebagai berikut:

1. Permodalan, yaitu rasio modal terhadap aktiva tertimbang menurut resiko.
2. Kualitas aktiva produktif, yaitu rasio aktiva produktif yang diklarifikasikan terhadap aktiva produktif dan rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva produktif yang diklarifikasikan.

3. Manajemen, yaitu manajemen permodalan, manajemen aktiva, manajemen umum, manajemen rentabilitas, dan manajemen likuiditas.
4. Rentabilitas, yaitu rasio laba terhadap rata-rata volume usaha dan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional.
5. Likuiditas, yaitu rasio kewajiban bersih *call money* terhadap aktiva lancar dan rasio kredit terhadap dana yang diterima.

4.6 Hipotesis

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka berkaitan dengan analisis efisiensi kinerja antara Bank BUMN dan Bank Swasta Nasional di Indonesia dinyatakan dengan hipotesis:

H_1 : *Terdapat perbedaan antara efisiensi kinerja Bank BUMN dan Bank Swasta Nasional di Indonesia.*

H_2 : *Efisiensi kinerja Bank BUMN lebih baik bila dibandingkan dengan efisiensi kinerja Bank Swasta Nasional di Indonesia.*

BAB V

METODE PENELITIAN

5.1 Obyek Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada analisis kinerja Bank BUMN yang terdiri dari Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Ekspor Indonesia dan Bank Swasta Nasional yang menjadi 5 besar di Indonesia yang terdiri dari Bank Central Asia (BCA), Bank Danamon Indonesia, Bank Internasional Indonesia, Bank Niaga, Bank Panin (Infobank, 2006) yang berdasarkan pada laporan keuangan yang telah dipublikasikan periode 2006.

5.2 Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder tahun 2006. Data sekunder menurut Mubyarto dan Suratno (1981 : 50) adalah data yang pengumpulannya dilakukan oleh pihak lain.

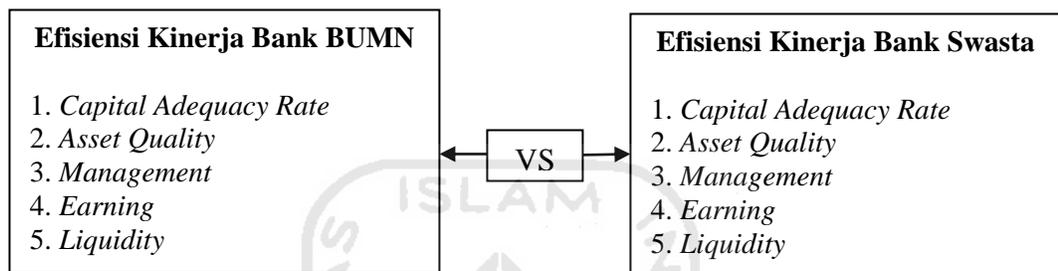
5.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan diperoleh dari laporan keuangan yang dipublikasikan di Direktori Perbankan Indonesian (Bank Indonesia, 2006).

5.4 Model Penelitian

Berdasarkan hipotesis yang ada dapat digambarkan dengan model sebagai berikut:

GAMBAR 5.1
Efisiensi Kinerja Bank



5.5 Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat Kecukupan Modal (*Capital Adequacy Rate*) yaitu rasio modal terhadap aktiva tertimbang menurut resiko (SK Direksi BI No.30/11/ KEP/DIR tanggal 30 April 1997).
- b. Kualitas Aktiva Produktif (*Asset Quality*) yaitu rasio aktiva produktif yang diklarifikasikan terhadap aktiva produktif dan rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva produktif yang diklarifikasikan (SK Direksi BI No.30/11/ KEP/DIR tanggal 30 April 1997).
- c. Kualitas Manajemen (*Management*) yaitu manajemen permodalan, manajemen aktiva, manajemen umum, manajemen rentabilitas, dan manajemen likuiditas (SK Direksi BI No.30/11/ KEP/DIR tanggal 30 April 1997).

- d. Rentabilitas/Kemampuan Menghasilkan Pendapatan (*Earning*) yaitu rasio laba terhadap rata-rata volume usaha dan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (SK Direksi BI No.30/11/ KEP/DIR tanggal 30 April 1997).
- e. Likuiditas (*Liquidity*) yaitu rasio kewajiban bersih *call money* terhadap aktiva lancar dan rasio kredit terhadap dana yang diterima. (SK Direksi BI No.30/11/ KEP/DIR tanggal 30 April 1997).

5.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan dengan pengujian melalui prosedur sebagai berikut: (1) menentukan rasio keuangan CAMEL dari setiap kelompok pada Bank BUMN dan Bank Swasta Nasional; (2) menentukan tingkat rata-rata (*mean*) efisiensi kinerja dari setiap kelompok pada Bank BUMN dan Bank Swasta Nasional; (3) menentukan perbedaan rata-rata efisiensi kinerja antara Bank BUMN dan Bank Swasta Nasional.

Penentuan rasio keuangan CAMEL dari setiap kelompok pada Bank BUMN dan Bank Swasta Nasional digunakan rumus sebagai berikut:

1. C : *Capital* (untuk rasio kecukupan modal)

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Resiko}}$$

2. A : *Assets* (untuk rasio kualitas aktiva)

$$\text{BDR} = \frac{\text{Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan}}{\text{Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan}}$$

Aktiva Tertimbang Menurut Resiko

3. M : *Management* (untuk menilai kualitas manajemen)

Aspek kualitas manajemen diukur berdasarkan kemampuannya memperoleh margin, yaitu :

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Operating Income}}$$

4. E : *Earnings* (untuk rasio rentabilitas bank)

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$

5. L : *Liquidity* (untuk rasio likuiditas bank)

$$\text{LDR} = \frac{\text{Jumlah Kredit Yang Diberikan}}{\text{Dana Pihak Ketiga + KLBI + Modal Inti}}$$

Keterangan :

CAR = *Capital Adequacy Ratio*

BDR = *Bad Debt Ratio*

ROA = *Return on Assets*

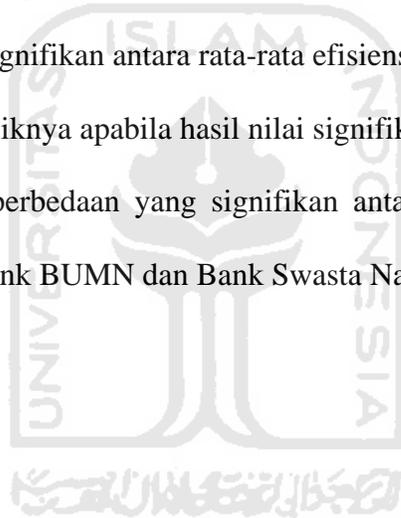
LDR = *Loan to Deposit Ratio*

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji beda t-test digunakan untuk menentukan apakah dua sampel yang tidak berhubungan memiliki rata-rata yang berbeda. Uji beda t-test dilakukan dengan cara membandingkan perbedaan antara dua nilai rata-rata dengan *standar error* dari perbedaan rata-rata dua

sampel. Tujuan uji beda t-test adalah membandingkan rata-rata dua grup yang tidak berhubungan satu dengan yang lain, di mana kedua grup tersebut mempunyai nilai rata-rata yang sama atau tidak secara signifikan. Adapun rumus uji beda t-test dapat ditulis sebagai berikut (Ghozali, 2001):

$$t = \frac{\text{Rata-rata sampel pertama} - \text{rata-rata sampel kedua}}{\text{Standar error perbedaan rata-rata kedua sampel}}$$

Apabila hasil nilai signifikansi t lebih besar dari 0,05 berarti menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata efisiensi kinerja bank BUMN dan bank swasta nasional. Sebaliknya apabila hasil nilai signifikansi t lebih kecil dari 0,05 berarti menunjukkan ada perbedaan yang signifikan antara yang signifikan antara rata-rata efisiensi kinerja bank BUMN dan Bank Swasta Nasional.



BAB VI
ANALISIS HASIL PENELITIAN

6.1. Analisis Data

Pengujian untuk melihat ada atau tidaknya perbedaan antara efisiensi kinerja bank pemerintah (BUMN) dengan bank swasta nasional dilakukan dengan menggunakan uji-t atau uji beda.

6.1.1 Uji Beda t- Test *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Tahun 2006

Setelah data diolah dengan menggunakan bantuan komputer dengan program SPSS for Windows Release 15 perhitungan seperti pada lampiran 2-1. Dan ringkasan hasil program seperti pada tabel 6.1 berikut ini:

TABEL 6.1.
Hasil Analisis Statistik Deskriptif Uji Beda t-Test CAR

Group Statistics

	Bank	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
CAR	1.00	5	30.6120	26.08974	11.66769
	2.00	5	23.5220	5.24087	2.34379

Sumber: hasil olah data, 2007

Pada tabel 6.1 merupakan statistik deskriptif hasil uji-t untuk melihat perbedaan efisiensi kinerja pada bank pemerintah (BUMN) (1) dengan bank swasta nasional di Indonesia (2). Berdasarkan jumlah bank pemerintah yang ada di Indonesia terdapat 5 amatan (N) dan 5 bank swasta nasional dengan peringkat terbaik di Indonesia (2) terdapat 5 amatan (N). Untuk CAR pada bank pemerintah

(BUMN) (1) diperoleh nilai rata-rata (*mean*) CAR sebesar 30,61 %, sementara untuk CAR 5 bank swasta nasional dengan peringkat terbaik di Indonesia (2) diperoleh nilai rata-rata (*mean*) CAR sebesar 23,52%. Selisih sebesar 7,09 % pada bank pemerintah (BUMN) (1) memberikan arti bahwa CAR pada bank pemerintah (BUMN) lebih baik dibandingkan dengan CAR pada bank swasta nasional. Hal ini memperlihatkan bahwa efisiensi kinerja pada bank pemerintah (BUMN) (1) lebih baik dibandingkan dengan bank swasta nasional di Indonesia (2).

Secara absolut jelas terlihat bahwa rata-rata (*mean*) CAR bank pemerintah (BUMN) (1) berbeda dengan bank swasta nasional (2), untuk melihat perbedaan ini apakah nyata secara statistik maka harus dilihat hasil uji kedua yaitu *independent sample test*. Untuk menguji asumsi apakah varians populasi kedua sampel tersebut sama (*equal variance assumed*) ataukah berbeda (*equal variance not assumed*) dengan melihat nilai *levene test*. Pengambilan keputusannya adalah, jika probabilitas $> 0,05$ maka H_0 tidak dapat ditolak atau H_0 diterima, artinya varians sama. Sebaliknya jika probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak, artinya varians berbeda. Berikut ini merupakan tabel 6.2 yang menunjukkan *independent sample test*:

TABEL 6.2
Hasil Uji Beda t-Test CAR

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
CAR	Equal variances assumed	4.35	.070	.596	8	.568	7.09000	11.90077	-20.35	34.53
	Equal variances not assumed			.596	4.322	.581	7.09000	11.90077	-25.00	39.18

Sumber: hasil olah data, 2007

Pada tabel 6.2 terlihat bahwa F hitung untuk CAR dengan *equal variance not assumed* (diasumsikan kedua varians tidak sama/berbeda) adalah 4,35% dengan probabilitas 0,07. Oleh karena probabilitas $> 0,05$, maka H_0 tidak ditolak atau H_0 diterima, artinya kedua varians adalah sama. Oleh karena tidak ada perbedaan yang nyata dari kedua varians membuat penggunaan varians untuk membandingkan rata-rata populasi dengan t test sebaiknya menggunakan dasar *equal variance assumed* (diasumsikan kedua varians sama).

Terlihat bahwa t hitung untuk CAR dengan *equal variance assumed* adalah 0,596 dengan probabilitas 0,568. Oleh karena probabilitas uji dua sisi maka nilai tersebut harus dibagi dua, $0,568/2 = 0,284$ adalah $> 0,025$, maka H_0 tidak ditolak

atau H_0 diterima. Hal tersebut berarti bahwa kedua rata-rata (*mean*) CAR pada bank pemerintah (BUMN) (1) dan bank swasta nasional (2) tidak berbeda atau sama. Bisa juga dikatakan, terdapat bukti statistik yang bisa menyatakan bahwa rata-rata (*mean*) CAR pada bank pemerintah (BUMN) (1) tidak berbeda atau sama dengan rata-rata (*mean*) CAR bank swasta nasional (2).

6.1.2. Uji Beda t- Test *Bad Debt Ratio* (BDR) Tahun 2006

Setelah data diolah dengan menggunakan bantuan komputer dengan program SPSS for Windows Release 15 perhitungan seperti pada lampiran 2-2. Dan ringkasan hasil program seperti pada tabel 6.3 berikut ini:

TABEL 6.3.
Hasil Analisis Statistik Deskriptif Uji Beda t-Test BDR

Group Statistics

	Bank	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
BDR	1.00	5	2.1000	.48770	.21811
	2.00	5	2.4860	2.30368	1.03024

Sumber: hasil olah data, 2007

Pada tabel 6.3 merupakan statistik deskriptif hasil uji-t untuk melihat perbedaan efisiensi kinerja pada bank pemerintah (BUMN) (1) dengan bank swasta nasional di Indonesia (2). Berdasarkan jumlah bank pemerintah yang ada di Indonesia terdapat 5 amatan (N) dan 5 bank swasta nasional dengan peringkat terbaik di Indonesia (2) terdapat 5 amatan (N).. Untuk BDR pada bank pemerintah (BUMN) (1) diperoleh nilai rata-rata (*mean*) BDR sebesar 2,10 %, sementara untuk BDR 5 bank swasta nasional dengan peringkat terbaik di Indonesia (2) diperoleh

nilai rata-rata BDR (*mean*) sebesar 2,486 %. Selisih sebesar 0,386 % pada bank swasta nasional (2) memberikan arti bahwa BDR pada bank swasta nasional (2) lebih baik dibandingkan dengan BDR bank pemerintah (BUMN) (1). Hal ini memperlihatkan bahwa efisiensi kinerja pada bank swasta nasional di Indonesia (2) lebih baik dibandingkan dengan pada bank pemerintah (BUMN) (1).

Secara absolut jelas terlihat bahwa rata-rata (*mean*) BDR bank pemerintah (BUMN) (1) berbeda dengan bank swasta nasional (2), untuk melihat perbedaan ini apakah nyata secara statistik maka harus dilihat hasil uji kedua yaitu *independent sample test*. Untuk menguji asumsi apakah varians populasi kedua sampel tersebut sama (*equal variance assumed*) ataukah berbeda (*equal variance not assumed*) dengan melihat nilai *levene test*. Pengambilan keputusannya adalah, jika probabilitas $> 0,05$ maka H_0 tidak dapat ditolak/diterima, artinya varians sama. Sebaliknya jika probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak, artinya varians berbeda. Berikut ini merupakan tabel yang menunjukkan *independent sample test*:

TABEL 6.4
Hasil Uji Beda t-Test BDR

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
BDR	Equal variances assumed	4.077	.078	-.367	8	.723	-.38600	1.05307	-2.814	2.042
	Equal variances not assumed			-.367	4.4	.731	-.38600	1.05307	-3.217	2.445

Sumber: hasil olah data, 2007

Pada tabel 6.4 terlihat bahwa F hitung untuk BDR dengan *equal variance not assumed* (diasumsikan kedua varians tidak sama/berbeda) adalah 4,077% dengan probabilitas 0,078. Oleh karena probabilitas $> 0,05$, maka H_0 tidak ditolak atau H_0 diterima, artinya kedua varians adalah sama. Oleh karena tidak ada perbedaan yang nyata dari kedua varians membuat penggunaan varians untuk membandingkan rata-rata populasi dengan t test sebaiknya menggunakan dasar *equal variance assumed* (diasumsikan kedua varians sama).

Terlihat bahwa t hitung untuk BDR dengan *equal variance assumed* adalah 0,367 dengan probabilitas 0,723. Oleh karena probabilitas uji dua sisi maka nilai tersebut harus dibagi dua, $0,723/2 = 0,3615$ adalah $> 0,025$, maka H_0 tidak ditolak

atau H_0 diterima. Hal tersebut berarti bahwa kedua rata-rata (*mean*) BDR pada bank pemerintah (BUMN) (1) dan bank swasta nasional (2) tidak berbeda atau sama. Bisa juga dikatakan, terdapat bukti statistik yang bisa menyatakan bahwa rata-rata (*mean*) BDR pada bank pemerintah (BUMN) (1) tidak berbeda atau sama dengan rata-rata (*mean*) BDR bank swasta nasional (2).

6.1.3. Uji Beda t- Test *Net Profit Margin* (NPM) Tahun 2006

Setelah data diolah dengan menggunakan bantuan komputer dengan program SPSS for Windows Release 15 perhitungan seperti pada lampiran 2-3. Dan ringkasan hasil program seperti pada tabel berikut ini:

TABEL 6.5.
Hasil Analisis Statistik Deskriptif Uji Beda t-Test NPM

Group Statistics

	Bank	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
NPM	1.00	5	1.3600	.14353	.06419
	2.00	5	1.4880	.26939	.12047

Sumber: hasil olah data, 2007

Pada tabel 6.5 merupakan statistik deskriptif hasil uji-t untuk melihat perbedaan efisiensi kinerja pada bank pemerintah (BUMN) (1) dengan bank swasta nasional di Indonesia (2). Berdasarkan jumlah bank pemerintah yang ada di Indonesia terdapat 5 amatan (N) dan 5 bank swasta nasional dengan peringkat terbaik di Indonesia (2) terdapat 5 amatan (N). Untuk NPM pada bank pemerintah (BUMN) (1) diperoleh nilai rata-rata (*mean*) BDR sebesar 1,36 %, sementara untuk NPM 5 bank swasta nasional dengan peringkat terbaik di Indonesia (2) diperoleh

nilai rata-rata (*mean*) NPM sebesar 1,488 %. Selisih sebesar 0,128 % pada bank swasta nasional (2) memberikan arti bahwa NPM pada bank swasta nasional (2) lebih baik dibandingkan dengan NPM bank pemerintah (BUMN) (1). Hal ini memperlihatkan bahwa efisiensi kinerja pada bank swasta nasional di Indonesia (2) lebih baik dibandingkan dengan pada bank pemerintah (BUMN) (1).

Secara absolut jelas terlihat bahwa rata-rata (*mean*) NPM bank pemerintah (BUMN) (1) berbeda dengan bank swasta nasional (2), untuk melihat perbedaan ini apakah nyata secara statistik maka harus dilihat hasil uji kedua yaitu *independent sample test*. Untuk menguji asumsi apakah varians populasi kedua sampel tersebut sama (*equal variance assumed*) ataukah berbeda (*equal variance not assumed*) dengan melihat nilai *levene test*. Pengambilan keputusannya adalah, jika probabilitas $> 0,05$ maka H_0 tidak dapat ditolak atau H_0 diterima, artinya varians sama. Sebaliknya jika probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak, artinya varians berbeda. Berikut ini merupakan tabel 6.6 yang menunjukkan *independent sample test*:

TABEL 6.6
Hasil Uji Beda t-Test NPM

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
NPM	Equal variances assumed	1.193	.307	-.938	8	.376	-.12800	.13651	-.44278	.18678
	Equal variances not assumed			-.938	6.102	.384	-.12800	.13651	-.46068	.20468

Sumber: hasil olah data, 2007

Pada tabel 6.6 terlihat bahwa F hitung untuk NPM dengan *equal variance not assumed* (diasumsikan kedua varians tidak sama/berbeda) adalah 1,193% dengan probabilitas 0,307. Oleh karena probabilitas > 0,05, maka Ho tidak ditolak atau Ho diterima, atau kedua varians adalah sama. Oleh karena tidak ada perbedaan yang nyata dari kedua varians membuat penggunaan varians untuk membandingkan rata-rata populasi dengan t test sebaiknya menggunakan dasar *equal variance assumed* (diasumsikan kedua varians sama).

Terlihat bahwa t hitung untuk NPM dengan *equal variance assumed* adalah 0,938% dengan probabilitas 0,376. Oleh karena probabilitas uji dua sisi maka nilai tersebut harus dibagi dua, $0,376/2 = 0,188$ adalah > 0,025, maka Ho tidak ditolak

atau H_0 diterima. Hal tersebut berarti bahwa kedua rata-rata (*mean*) NPM pada bank pemerintah (BUMN) (1) dan bank swasta nasional (2) tidak berbeda atau sama. Bisa juga dikatakan, terdapat bukti statistik yang bisa menyatakan bahwa rata-rata (*mean*) NPM pada bank pemerintah (BUMN) (1) tidak berbeda atau sama dengan rata-rata (*mean*) NPM bank swasta nasional (2).

6.1.4. Uji Beda t- Test *Return on Assets* (ROA) Tahun 2006

Setelah data diolah dengan menggunakan bantuan komputer dengan program SPSS for Windows Release 15 perhitungan seperti pada lampiran 2-4. Dan ringkasan hasil program seperti pada tabel 6.7 berikut ini:

TABEL 6.7
Hasil Analisis Statistik Deskriptif Uji Beda t-Test ROA

Group Statistics

	Bank	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
ROA	1.00	5	2.5920	1.76629	.78991
	2.00	5	2.5360	.86164	.38534

Sumber: hasil olah data, 2007

Pada tabel 6.7 merupakan statistik deskriptif hasil uji-t untuk melihat perbedaan efisiensi kinerja pada bank pemerintah (BUMN) (1) dengan bank swasta nasional di Indonesia (2). Berdasarkan jumlah bank pemerintah yang ada di Indonesia terdapat 5 amatan (N) dan 5 bank swasta nasional dengan peringkat terbaik di Indonesia (2) terdapat 5 amatan (N). Untuk ROA pada bank pemerintah (BUMN) (1) diperoleh nilai rata-rata (*mean*) ROA sebesar 2,592%, sementara untuk ROA 5 bank swasta nasional dengan peringkat terbaik di Indonesia (2) diperoleh

nilai rata-rata (*mean*) ROA sebesar 2,536 %. Selisih sebesar 0,056 % pada bank pemerintah (BUMN) (1) memberikan arti bahwa ROA pada bank pemerintah (BUMN) (1) lebih baik dibandingkan dengan ROA bank swasta nasional (2). Hal ini memperlihatkan bahwa efisiensi kinerja pada bank pemerintah (BUMN) (1) lebih baik dibandingkan dengan bank swasta nasional di Indonesia (2).

Secara absolut jelas terlihat bahwa rata-rata (*mean*) ROA bank pemerintah (BUMN) (1) berbeda dengan bank swasta nasional (2), untuk melihat perbedaan ini apakah nyata secara statistik maka harus dilihat hasil uji kedua yaitu *independent sample test*. Untuk menguji asumsi apakah varians populasi kedua sampel tersebut sama (*equal variance assumed*) ataukah berbeda (*equal variance not assumed*) dengan melihat nilai *levene test*. Pengambilan keputusannya adalah, jika probabilitas $> 0,05$ maka H_0 tidak dapat ditolak atau H_0 diterima, artinya varians sama. Sebaliknya jika probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak, artinya varians berbeda. Berikut ini merupakan tabel 4.8 yang menunjukkan *independent sample test*:

TABEL 6.8
Hasil Uji Beda t-Test ROA

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
ROA	Equal variances assumed	5.335	.050	.064	8	.951	.05600	.87889	-1.971	2.0827
	Equal variances not assumed			.064	5.8	.951	.05600	.87889	-2.112	2.2245

Sumber: hasil olah data, 2007

Pada tabel 6.8 terlihat bahwa F hitung untuk ROA dengan *equal variance not assumed* (diasumsikan kedua varians tidak sama/berbeda) adalah 5,335% dengan probabilitas 0,050. Oleh karena probabilitas = 0,05, maka H_0 tidak ditolak atau H_0 diterima, atau kedua varians adalah sama. Oleh karena tidak ada perbedaan yang nyata dari kedua varians membuat penggunaan varians untuk membandingkan rata-rata populasi dengan t test dapat menggunakan dasar *equal variance assumed* (diasumsikan kedua varians sama) maupun menggunakan dasar *equal variance not assumed* (diasumsikan kedua varians tidak sama).

Terlihat bahwa t hitung untuk ROA dengan *equal variance assumed* maupun *equal variance not assumed* adalah 0,64% dengan probabilitas 0,951. Oleh karena probabilitas uji dua sisi maka nilai tersebut harus dibagi dua, $0,951/2 = 0,4755$

adalah $> 0,025$, maka H_0 tidak ditolak atau H_0 diterima. Hal tersebut berarti bahwa kedua rata-rata (*mean*) ROA pada bank pemerintah (BUMN) (1) dan bank swasta nasional (2) tidak berbeda atau sama. Bisa juga dikatakan, terdapat bukti statistik yang bisa menyatakan bahwa rata-rata (*mean*) ROA pada bank pemerintah (BUMN) (1) tidak berbeda atau sama dengan rata-rata (*mean*) ROA bank swasta nasional (2).

4.1.5. Uji Beda t- Test *Loan to Deposit Ratio* (LDR) Tahun 2006

Setelah data diolah dengan menggunakan bantuan komputer dengan program SPSS for Windows Release 15 perhitungan seperti pada lampiran 2-5. Dan ringkasan hasil program seperti pada tabel 6.9 berikut ini:

TABEL 6.9.
Hasil Analisis Statistik Deskriptif Uji Beda t-Test LDR

Group Statistics

	Bank	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
LDR	1.00	5	168.5460	234.67434	104.94956
	2.00	5	67.6560	18.54977	8.29571

Sumber: hasil olah data, 2007

Pada tabel 6.9 merupakan statistik deskriptif hasil uji-t untuk melihat perbedaan efisiensi kinerja pada bank pemerintah (BUMN) (1) dengan bank swasta nasional di Indonesia (2). Berdasarkan jumlah bank pemerintah yang ada di Indonesia terdapat 5 amatan (N) dan 5 bank swasta nasional dengan peringkat terbaik di Indonesia (2) terdapat 5 amatan (N). Untuk LDR pada bank pemerintah (BUMN) (1) diperoleh nilai rata-rata (*mean*) LDR sebesar 168,546 %. Sementara untuk LDR 5 bank swasta nasional dengan peringkat terbaik di Indonesia (2)

diperoleh nilai rata-rata (*mean*) LDR sebesar 67,656 %. Selisih sebesar 100,89 % pada pada bank pemerintah (BUMN) (1) memberikan arti bahwa LDR pada bank pemerintah (BUMN) (1) lebih baik dibandingkan dengan LDR bank swasta nasional (2). Hal ini memperlihatkan bahwa efisiensi kinerja pada bank pemerintah (BUMN) (1) lebih baik dibandingkan dengan pada bank swasta nasional di Indonesia (2).

Secara absolut jelas terlihat bahwa rata-rata (*mean*) LDR bank pemerintah (BUMN) (1) berbeda dengan bank swasta nasional (2), untuk melihat perbedaan ini apakah nyata secara statistik maka harus dilihat hasil uji kedua yaitu *independent sample test*. Untuk menguji asumsi apakah varians populasi kedua sampel tersebut sama (*equal variance assumed*) ataukah berbeda (*equal variance not assumed*) dengan melihat nilai *levene test*. Pengambilan keputusannya adalah, jika probabilitas $> 0,05$ maka H_0 tidak dapat ditolak atau H_0 diterima, artinya varians sama. Sebaliknya jika probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak, artinya varians berbeda. Berikut ini merupakan tabel 6.10 yang menunjukkan *independent sample test*:

TABEL 6.10
Hasil Uji Beda t-Test LDR

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
LDR	Equal variances assumed	5.804	.043	.958	8	.366	100.89000	105.27691	-141.88	343.66
	Equal variances not assumed			.958	4.0	.392	100.89000	105.27691	-189.99	391.77

Sumber: hasil olah data, 2007

Pada tabel 6.10 terlihat bahwa F hitung untuk LDR dengan *equal variance not assumed* (diasumsikan kedua varians tidak sama/berbeda) adalah 5,804% dengan probabilitas 0,043. Oleh karena probabilitas < 0,05, maka Ho ditolak, atau kedua varians adalah tidak sama. Oleh karena ada perbedaan yang nyata dari kedua varians membuat penggunaan varians untuk membandingkan rata-rata populasi dengan t test dapat menggunakan dasar *equal variance not assumed* (diasumsikan kedua varians tidak sama).

Terlihat bahwa t hitung untuk ROA dengan *equal variance not assumed* adalah 0,958% dengan probabilitas 0,392. Oleh karena probabilitas uji dua sisi maka nilai tersebut harus dibagi dua, $0,392/2 = 0,196$ adalah > 0,025, maka Ho tidak

ditolak atau H_0 diterima. Hal tersebut berarti bahwa kedua rata-rata (*mean*) ROA pada bank pemerintah (BUMN) (1) dan bank swasta nasional (2) tidak berbeda atau sama. Bisa juga dikatakan, terdapat bukti statistik yang bisa menyatakan bahwa rata-rata (*mean*) ROA pada bank pemerintah (BUMN) (1) tidak berbeda atau sama dengan rata-rata (*mean*) ROA bank swasta nasional (2).

6.2. Analisis Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data dengan pengujian uji beda t-Test memperlihatkan bahwa hasil perhitungan CAMEL menunjukkan tidak ada perbedaan antara kinerja pada bank pemerintah (BUMN) (1) dengan bank swasta nasional (2), seperti yang ditunjukkan pada tabel 6-11 berikut ini:

TABEL 6.11
Hasil Perhitungan CAMEL dengan Uji Beda t-Test Pada Bank pemerintah (BUMN) dan Bank Swasta Nasional

CAR	BDR	NPM	ROA	LDR
Tidak ada perbedaan				

Sumber: hasil olah data, 2007

Bila dilihat pada rasio CAMEL yang meliputi CAR, BDR, NPM, ROA, dan LDR memperlihatkan hasil tidak adanya perbedaan kinerja antara bank pemerintah (BUMN) dengan bank swasta nasional. Dengan demikian hipotesis yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara efisiensi kinerja bank BUMN dan bank swasta nasional di Indonesia serta efisiensi kinerja pada bank pemerintah

(BUMN) lebih baik bila dibandingkan dengan efisiensi kinerja pada bank swasta nasional secara statistik tidak dapat dibuktikan atau hipotesis tersebut ditolak.



BAB VII

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

7.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat diperoleh kesimpulan yang menyatakan bahwa bila dilihat dari rasio CAMEL yang meliputi CAR, BDR, NPM, ROA, dan LDR memperlihatkan hasil tidak adanya perbedaan efisiensi kinerja antara bank pemerintah (BUMN) dengan bank swasta nasional. Dengan demikian hipotesis yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara efisiensi kinerja bank BUMN dan bank swasta nasional di Indonesia serta efisiensi kinerja pada bank pemerintah (BUMN) lebih baik bila dibandingkan dengan efisiensi kinerja pada bank swasta nasional secara statistik tidak dapat dibuktikan atau hipotesis tersebut ditolak.

7.2. Implikasi

Studi ini mempunyai keterbatasan, di antaranya adalah :

1. Jumlah sampel penelitian yang terbatas hanya pada bank pemerintah (BUMN) dan bank swasta nasional.
2. Tahun penelitian yang hanya terbatas satu tahun yaitu pada tahun 2006.

Studi ini dapat dilanjutkan dengan meneliti lebih banyak sampel penelitian berupa kelompok bank umum swasta nasional non devisa, bank umum swasta

nasional devisa, bank campuran, bank asing dan lainnya serta perlunya penambahan jumlah tahun penelitian agar dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih obyektif.



DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, Aang (2002), "Kinerja Bank Pembangunan Daerah", *Perbanas Finance & Banking*, Volume 4, No. 1, 51-58.
- Ariesanti, Alia (2000), "Studi tingkat Efisiensi: Perbandingan Besar Perusahaan dan Efek Krisis Ekonomi", *Jurnal Dian Ekonomi*, Volume VI, No. 2, 215-230.
- Aristanto, Eko (2005), "Kajian Mengenai Likuiditas dan Profitabilitas Bank Pemerintah (BUMN) di Indonesia Periode 2003-2004", *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Tahun IX, No. 3, 837-850.
- Bank Indonesia, *Laporan Tahunan*, 2007.
- Ghozali, Imam (2005), *Analisis multivariate dengan program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Iswardono (1996), *Uang dan Bank*, BPFE UGM, Yogyakarta.
- Kristopo (2006), "Perbankan Indonesia Turun Peringkat Di Asia Tenggara", *Infobank*, No.331, Hal. 34-41, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad dan Suhardjono (2002), *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, BPFE, Yogyakarta.
- Manurung, Mandala & P. Rahardja (2004), *Uang Perbankan dan Ekonomi Moneter Kajian Kontekstual Indonesia*, Fakultas Ekonomi UI, Jakarta.
- Sakhowi, Akhmad (2005), "Analisis Kinerja Lembaga Keuangan Bank Yang Terdaftar di BEJ", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume 3, No. 1, 48-61.
- Setyowati, Wiwik dan D. Suharjanto (2005), Analisis Rasio Keuangan Untuk Pengelompokan Kinerja Bank Umum Swasta Nasional, *Jurnal Bisnis dan Manajemen* Volume 5, No.1, 103-114.
- Sri Y, Susilo, dkk (2000), *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta.
- Suyatmin (2006), Analisis Cash Rasio, LDR dan LAR Untuk Mengukur Tingkat Likuiditas Perbankan, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Volume 5, No. 2, 134-166.

Lampiran 1

DATA CAMEL TAHUN 2006

No	Bank	<i>Capital</i>	<i>Asset</i>	<i>Management</i>	<i>Earnings</i>	<i>Liquidity</i>
		CAR	BDR	NPM	ROA	LDR
1	MANDIRI	23%	2,18%	1,12%	0,47%	49,97%
2	BNI	15,95%	1,77%	1,38%	1,85%	48,98%
3	BRI	18,82%	1,79%	1,36%	4,36%	72,53%
4	BTN	18,23%	2,92%	1,48%	1,78%	83,75%
5	EXIM	77,06%	1,84%	1,46%	4,50%	587,50%
6	BCA	22,21%	1,70%	1,42%	3,80%	40,30%
7	DANAMON	22,37%	1,36%	1,86%	2,40%	75,51%
8	BII	24,08%	6,59%	1,12%	1,43%	57,22%
9	NIAGA	17,24%	1,17%	1,59%	2,27%	84,78%
10	PANIN	31,71%	1,61%	1,45%	2,78%	80,47%

Sumber: Dorektori Perbankan Indonesia (Bank Indonesia, 2006)

CAR : *Capital Adequacy Ratio*
 BDR : *Bad Debt Ratio*
 NPM : *Net Profit Margin*
 ROA : *Return on Assets*
 LDR : *Loan to Deposit Ratio*